

# Pelatihan Pengelolaan Keuangan Kelompok Masyarakat (POKMAS) Di Kelurahan Lipu Kota Baubau Sulawesi Tenggara

Rudi Abdullah

Department Of Management, Faculty of Economic, Universitas Muhammadiyah Buton

\*Email : rudiabdullah@umbuton.ac.id

## Abstrak

*Kata kunci:*  
*Pelatihan,*  
*Manajemen*  
*Keuangan, Laporan*  
*Penghasilan dan*  
*Pengeluaran, dan*  
*Rencana dan*  
*Realisasi*

*Pentingnya perencanaan keuangan dan keterampilan mengenai pengelolaan keuangan bagi para anggota POKMAS sangat diperlukan karena kondisi masih banyaknya anggota POKMAS yang belum sepenuhnya memahami terkait kebijakan dan alur pengelolaan keuangan POKMAS dan Kinerja keuangan sekretariat POKMAS masih rendah. Tujuan penelitian ini adalah : 1) Untuk meningkatkan pemahaman tentang kebijakan manajemen keuangan dan alur pengelolaan keuangan, dan 2) Untuk meningkatkan kinerja keuangan Sekretariat POKMAS. Metode penelitian ini adalah: 1) Pelatihan Intensif, 2) Diskusi, dan 3) Pertanyaan dan Jawaban. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa peserta POKMAS telah memahami tentang kebijakan, aliran, dan prosedur manajemen keuangan yang berdampak pada kinerja POKMAS. Sekretariat POKMAS dalam manajemen keuangan terdiri dari: Kebijakan Pembukaan Rekening Bank, Pengeluaran Pendanaan Kebijakan, Kas Kebijakan, Sistem Pembukuan Kebijakan, dan Pembuatan Kebijakan RAPB POKMAS. Selanjutnya, aliran Pembukuan POKMAS dimulai dari pencatatan transaksi pada masing-masing bukti berdasarkan jenis transaksi, kemudian bukti diposting pada setiap buku sesuai dengan jenis transaksi yang telah ditulis di bukti. Setelah aliran selesai dilaporkan Penghasilan dan Pengeluaran, dan Rencana dan Pernyataan Realisasi. Sekretariat POKMAS memperoleh laporan keuangan bulanan, yang menjelaskan secara rinci perubahan keuangan dalam satu bulan periode dan laporan tahunan.*

## 1. PENDAHULUAN

### 1.1 Analisis Situasi

Pemerintahan di Indonesia terdiri dari beberapa tingkatan mulai dari tingkat Desa, Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten/ Kota, Provinsi hingga Nasional. Kondisi struktur pemerintahan yang begitu panjang tentunya menimbulkan berbagai macam polemik mulai dari sulitnya mengelola masing-masing institusi secara detail hingga lambannya penyampaian informasi pada lini pemerintahan yang paling rendah yaitu Kelurahan.

Pemerintah dalam mengurangi tingkat kemiskinan dengan melakukan

pemberdayaan masyarakat melalui dana kelurahan. Lembaga pemerintah yang menangani masalah pemberdayaan masyarakat adalah Kelompok Masyarakat (POKMAS). Kelompok [1] adalah unit sosial yang terdiri dua atau lebih individu yang telah mengadakan interaksi sosial yang cukup intensif dan teratur, sehingga diantara individu itu sudah terdapat pembagian tugas, struktur, dan norma-norma tertentu yang khas bagi kelompok itu. Kelompok [2] adalah organisasi terdiri dari 2 (dua) atau lebih individu-individu yang tergantung oleh ikatan-ikatan suatu sistem ukuran-ukuran kelakuan yang

diterima dan disetujui oleh semua anggota-anggotanya. Kelompok [3] adalah kumpulan yang terdiri dari 2 (dua) atau lebih individu, dan kehadiran masing-masing individu mempunyai arti serta nilai bagi orang lain, dan ada dalam situasi mempengaruhi. Pada setiap anggota-anggota tadi selalu terdapat aksi-aksi dan reaksi-reaksi yang timbal balik. Masyarakat (*society*) [4] yaitu wadah segenap individu-individu yang menyelenggarakan antar hubungan sosial, terdiri atas banyak sekali kolektifitas-kolektifitas serta kelompok-kelompok dan tiap-tiap kelompok terdiri atas kelompok-kelompok kecil atau sub kelompok. [5] Kelompok adalah himpunan atau kesatuan-kesatuan manusia yang hidup bersama dan mengadakan hubungan antara sesama mereka. Hubungan tersebut antara lain menyangkut hubungan timbal balik yang saling mempengaruhi dan juga kesadaran untuk saling menolong. Pengertian masyarakat itu sendiri [6] adalah sekelompok orang-orang yang bertempat tinggal di suatu wilayah geografis tertentu, dan satu sama lain saling berinteraksi untuk mencapai tujuan hidupnya. Masyarakat [7] merupakan kelompok-kelompok makhluk dengan realitas-realitas baru yang berkembang menurut hukum-hukumnya sendiri dan berkembang menurut pola perkembangan tersendiri. Manusia diikat dalam kehidupan kelompok karena rasa sosial serta-merta dan kebutuhannya.

Dari beberapa pengertian yang diungkapkan oleh beberapa ahli dapat disimpulkan kelompok masyarakat (POKMAS) dapat diartikan himpunan atau kesatuan-kesatuan manusia yang hidup bersama, oleh karenanya adanya antar hubungan antar mereka.

Pengertian pokmas dalam Program Dana Kelurahan adalah organisasi terkecil di tingkat kampung yang dibentuk untuk menyatukan aspirasi masyarakat. Kelompok Masyarakat (Pokmas) sebagai wadah aspirasi, pikiran dan tujuan bersama untuk memudahkan diseminasi informasi atau melibatkan sejumlah masyarakat di setiap kampungnya. Struktur kelompok masyarakat dalam

Program Dana Kelurahan terdiri dari, ketua, sekretaris, bendahara, dan anggota (3 orang). Tugas dan peranan Pokmas dalam Program Dana Kelurahan adalah sebagai berikut.

1. Menyelenggarakan dan bertanggung jawab secara teknis dan administratif dalam pelaksanaan kegiatan.
2. Ikut serta menyusun proposal dan rencana teknis kegiatan yang akan dilaksanakan dengan konsultan perencanaan yang ditunjuk oleh tim fasilitasi kabupaten.
3. Menyebarkan dan mensosialisasikan program.
4. Menghimpun potensi swadaya masyarakat untuk pelaksanaan kegiatan.
5. Menyiapkan rekening kolektif bersama kepala kampung pada bank yang ditunjuk.
6. Melaksanakan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana yang direncanakan.
7. Membimbing dan mengarahkan masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan.
8. Melakukan pembukuan penerimaan dana dan penggunaan dana.
9. Melaporkan perkembangan pelaksanaan dan hasil kegiatan kepada kepala kampung dan camat.

Pemerintah Pusat telah menetapkan Petunjuk Tentang Pelaksanaan Pembangunan di Kelurahan melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan [8] dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan dan pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2009 tentang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan pada Pasal 1 tertulis bahwa “ Penanggulangan kemiskinan adalah kebijakan dan program pemerintah dan pemerintah daerah yang dilakukan secara sistematis, terencana dan bersinergi dengan dunia usaha dan masyarakat untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dalam rangka meningkatkan derajat kesejahteraan rakyat[9]”.

Kelurahan Lipu [10] merupakan salah satu dari 43 kelurahan yang ada di Kota Baubau yang menjadi sasaran dari Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) dan satu dari empat kelurahan target penanganan permukiman kumuh kelurahan Kota Baubau 2016-2019. Hasil pendataan Tim Inti Perencanaan Partisipatif POKMAS Kel. Lipu menjelaskan bahwa penduduk Kelurahan Lipu secara umum merupakan penduduk dengan tingkat penghasilan yang berada dibawah rata-rata. Kondisi masyarakat secara umum bekerja pada sektor kelautan baik itu sebagai Pertanian, Perkebunan, Kehutanan, Peternakan, dan sebagainya. Penduduk Kelurahan Lipu berdasarkan jenis mata pencahariannya terbagi beberapa jenis diantaranya:

**Tabel 1 . Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian Kel. Lipu**

No	Mata Pencaharian	Jumlah Penduduk
1	Industri/Pabrik	32
2	Pegawai Pemerintah	35
3	Konstruksi/Bangunan	120
4	Pertanian,Perkebunan, Kehutanan, Peternakan	152
5	Pertambangan/Galian	10
6	Perdagangan/Jasa (Guru, Tenaga Kesehatan, Hotel, dll)	41
7	Perikanan/Nelayan	31
<b>Jumlah</b>		<b>421</b>

Sumber: Kelurahan Lipu

Penduduk Kelurahan Lipu sebesar 38% memenuhi kebutuhan sehari hari dengan bekerja di sektor Pertanian Perkebunan Kehutanan Peternakan dan sektor Konstruksi/Bangunan sebesar 30% Selebihnya bervariasi mulai dari industri, galian, ataupun pegawai pemerintah.

Informasi diatas menggambarkan masyarakat Kelurahan Lipu identik dengan masyarakat Pertanian, Perkebunan, Kehutanan, Peternakan dengan pendidikan dan kesejahteraan yang relatif rendah. Hal tersebut

disebabkan kondisi geografis dan latar belakang pendidikan yang dimiliki oleh masyarakat setempat. Kondisi ini pula yang menjadikan Kelurahan Lipu menjadi salah satu kawasan kumuh prioritas II yang cukup mendapat perhatian dari berbagai pihak, baik Pemda maupun swasta. Salah satunya adalah Bantuan Dana Kelurahan yang wajib dikelola oleh Kelurahan Lipu melalui bantuan POKMAS setempat untuk meminimalkan skala kawasan kumuh. Berdasarkan analisis kondisi di atas, kami memiliki program kegiatan pelatihan pengelolaan keuangan bagi para anggota Kelompok Masyarakat (POKMAS) di Kelurahan Lipu.

## 1.2 Identifikasi Dan Rumusan Masalah

Pentingnya perencanaan keuangan dan keterampilan mengenai pengelolaan keuangan dana Kelurahan bagi para anggota Kelompok Masyarakat (POKMAS) sangat diperlukan karena kondisi sebagai berikut:

1. Masih banyaknya anggota Kelompok Masyarakat (POKMAS) yang belum sepenuhnya memahami terkait kebijakan dan alur pengelolaan keuangan BKM.
2. Kinerja keuangan sekretariat Kelompok Masyarakat (POKMAS) masih rendah.

Berdasarkan identifikasi masalah tersebut, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

- a. Bagaimana cara meningkatkan pemahaman terkait kebijakan dan alur pengelolaan keuangan Kelompok Masyarakat (POKMAS)?
- b. Bagaimana cara meningkatkan kinerja keuangan sekretariat Kelompok Masyarakat (POKMAS)?

## 1.3 Tujuan PKM

Kegiatan pengabdian Masyarakat berupa pelatihan ini memiliki tujuan sebagai berikut:

- a. Meningkatkan pemahaman terkait kebijakan dan alur pengelolaan keuangan Kelompok Masyarakat (POKMAS).
- b. Meningkatkan kinerja keuangan sekretariat Kelompok Masyarakat (POKMAS).

#### 1.4 Manfaat PKM

Setelah memperoleh kegiatan pelatihan ini, para peserta pelatihan akan mendapat keberuntungan baik secara teoritis maupun praktik. Para peserta pelatihan juga diharapkan dapat menambah wawasan dan pemahaman tentang pengelolaan keuangan dana kelurahan. Adapun manfaat kegiatan pelatihan ini adalah:

- Peserta memiliki pemahaman terkait kebijakan dan alur pengelolaan keuangan Kelompok Masyarakat (POKMAS).
- Peserta mampu meningkatkan kinerja keuangan sekretariat Kelompok Masyarakat (POKMAS).

## 2. METODE KEGIATAN PKM

### 2.1 Khalayak Sasaran Kegiatan PKM

Khalayak sasaran kegiatan pengabdian pada masyarakat ini adalah anggota Kelompok Masyarakat (POKMAS) Kelurahan Lipu yang berjumlah 51 orang.

### 2.2 Metode Kegiatan PKM

Metode yang digunakan dalam kegiatan ini meliputi:

- Pelatihan intensif**  
Kegiatan pelatihan dilaksanakan dalam beberapa hari secara intensif. Bentuknya di ruangan, dengan menggunakan panduan materi yang telah dikembangkan.
- Diskusi**  
Berisi kegiatan diskusi tentang topik-topik yang dapat diangkat dalam pelatihan perencanaan keuangan dan keterampilan mengenai pengelolaan keuangan.
- Tanya Jawab**  
Berisi kegiatan tanya jawab tentang permasalahan atau kendala dalam pelatihan perencanaan keuangan dan keterampilan mengenai pengelolaan keuangan.
- Penugasan**  
Berisi kegiatan pemberian tugas kepada peserta pelatihan untuk rincian pengelolaan keuangan.

Sebagai narasumber kegiatan ini adalah dosen Tim Pengabdian PKM UM Buton, yaitu: Rudi Abdullah, S.E., M.M.,

Ak., dan Asrianti Dja'wa, SE., M.Ec.Dev. Adapun materi pelatihan yang di paparkan adalah tentang kebijakan pengelolaan keuangan dan pengawasan keuangan Kelompok Masyarakat (POKMAS) serta memberikan soal latihan terkait pengelolaan keuangan.

Dari analisis situasi dan survey di lapangan didapatkan permasalahan yaitu masih banyaknya anggota Kelompok Masyarakat (POKMAS) yang belum sepenuhnya memahami terkait kebijakan dan alur pengelolaan keuangan Kelompok Masyarakat (POKMAS), Kinerja keuangan sekretariat (POKMAS) masih rendah dan anggota (POKMAS) belum memiliki keterampilan yang memadai dalam pengelolaan keuangan. Strategi yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah dengan pelatihan pengelolaan keuangan bagi anggota (POKMAS). Adapun langkah kegiatan tersebut dapat diukur keberhasilannya dengan instrumen angket untuk memastikan tercapainya tujuan PKM kepada peserta kegiatan.

**Tabel 2.** Tujuan dan Indikator PKM

Tujuan	Indikator	Instrumen
Meningkatkan pemahaman terkait kebijakan dan alur pengelolaan keuangan POKMAS	Mengetahui konsep kebijakan dan alur pengelolaan keuangan POKMAS	Angket
Meningkatkan kinerja keuangan sekretariat POKMAS.	Memaksimalkan kinerja keuangan sekretariat POKMAS.	Angket

### 2.3 Faktor Pendukung Dan Penghambat

Faktor pendukung dari kegiatan PKM ini adalah:

- Kerjasama dengan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Muhammadiyah Buton, Fakultas Ekonomi
- Dukungan dari Pihak Pemerintah Setempat (Lurah Lipu) dan tokoh masyarakat dalam kegiatan PKM

tersebut dengan memberikan materi terkait kondisi terkini Pengelolaan POKMAS Kelurahan Lipu serta segala hal yang dibutuhkan dalam upaya persiapan pelatihan pengelolaan keuangan.

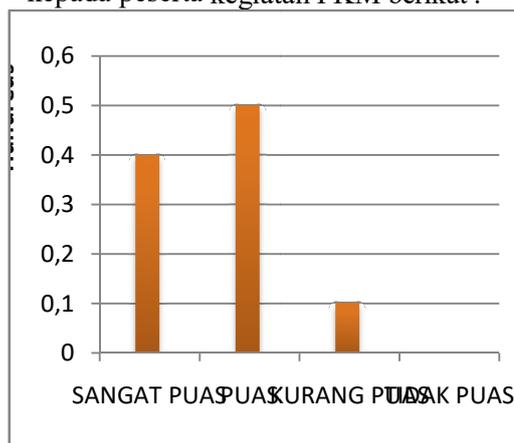
Faktor penghambat dari kegiatan ini hampir tidak ada sehingga kegiatan PKM dapat berjalan dengan lancar. Waktu yang terbatas untuk lebih banyak mengeksplorasi tentang kebijakan dan alur pengelolaan keuangan diatasi dengan bimbingan intensif antara Tim Pengabdian PKM UM Buton dengan anggota POKMAS. Hasil pelatihan berupa keterampilan dalam menyusun laporan keuangan POKMAS.

### 3. HASIL PELAKSANAAN KEGIATAN PKM

#### 3.1. Evaluasi Proses Kegiatan PKM

##### a. Evaluasi Kepuasan Peserta PKM

Salah satu indikator keberhasilan kegiatan PKM adalah adanya respon positif dari peserta kegiatan. Jika respon yang ditunjukkan peserta pada kategori positif atau puas maka dapat diartikan bahwa kegiatan tersebut memberikan kesan yang baik bagi peserta. Antusiasme peserta selama mengikuti kegiatan ditunjukkan dalam pelaksanaan kegiatan PKM. Hal tersebut juga tercermin dari angket yang diberikan kepada peserta kegiatan PKM berikut :



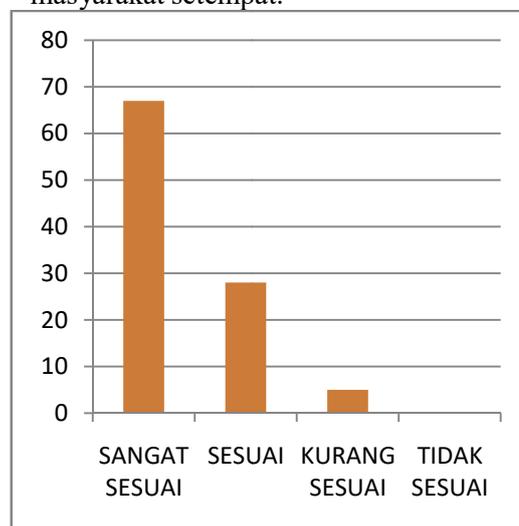
**Gambar 1.** Respon Peserta PKM

Gambar tersebut mendeskripsikan bahwa presentase peserta PKM pada kategori sangat puas sebesar 40%, kategori puas sebesar 50%,

kategori kurang puas sebesar 10% dan kategori tidak puas sebesar 0%. Hasil tersebut menunjukkan peserta PKM memberikan respon yang positif terhadap kegiatan PKM yang telah dilakukan.

##### b. Evaluasi Kesesuaian Kegiatan PKM dengan Kebutuhan Masyarakat

Indikator keberhasilan kegiatan PKM lainnya juga dapat dilihat dari evaluasi kesesuaian kegiatan PKM dengan kebutuhan masyarakat sasaran. Harapan Tim PKM UM.BUTON adalah materi pelatihan yang diberikan dapat memecahkan masalah yang ada, seperti kesulitan dalam meningkatkan pemahaman terkait kebijakan dan alur pengelolaan keuangan POKMAS, cara meningkatkan kinerja keuangan sekretariat POKMAS dan cara meningkatkan keterampilan dalam pengelolaan keuangan bagi anggota POKMAS. Berikut ini hasil dari angket peserta kegiatan POKMAS yang mengeksplorasi apakah pelatihan yang diberikan sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat.

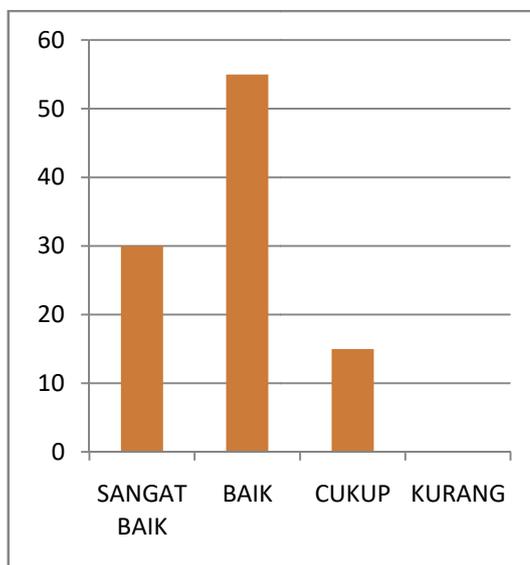


**Gambar 2.** Respon Kesesuaian Kebutuhan

Gambar tersebut mendeskripsikan bahwa peserta PKM menyatakan materi pelatihan PKM yang diberikan sangat sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang menjadi peserta pelatihan. Peserta pelatihan menjadi

lebih paham terkait kebijakan dan alur pengelolaan keuangan POKMAS, cara meningkatkan kinerja keuangan sekretariat POKMAS dan cara meningkatkan keterampilan dalam pengelolaan keuangan bagi anggota POKMAS.

- c. Evaluasi Kerjasama Program Kemitraan Masyarakat (PKM) Kerjasama Tim PKM UM. BUTON dengan mitra atau peserta kegiatan juga tidak luput dari penilaian. Kesan yang ditangkap oleh mitra dapat dilihat dari hasil angket yang dibagikan kepada peserta PKM.

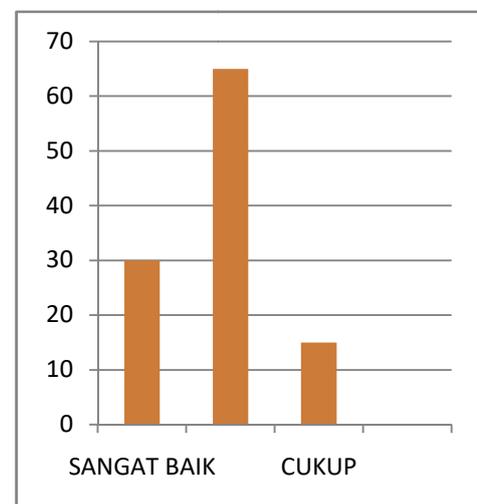


**Gambar 3.** Respon Peserta PKM

Gambar tersebut mendeskripsikan bahwa peserta PKM memberikan penilaian terkait kerjasama Tim PKM UM. BUTON dengan peserta kegiatan sebagian besar pada kategori baik dan sangat baik.

- d. Pengetahuan Terkait Kebijakan Dan Alur Pengelolaan Keuangan POKMAS Pengetahuan peserta kegiatan tentang kebijakan dan alur pengelolaan keuangan POKMAS sebelum pelatihan dilaksanakan adalah sangat minim. Selama ini mereka belum memiliki pengalaman termasuk tidak memiliki pengetahuan yang cukup tentang kebijakan dan alur pengelolaan keuangan. Pelatihan ini menitikberatkan pada arti penting

pengelolaan keuangan, tujuan pengelolaan keuangan dan pengawasan keuangan pada POKMAS. Selain itu, disampaikan pula materi tentang peningkatan pemahaman terkait kebijakan dan alur pengelolaan keuangan POKMAS bukanlah persoalan yang sulit, tetapi membutuhkan komitmen dari setiap perangkat POKMAS untuk bersama merintis dan mengembangkan pemahaman terkait kebijakan dan alur pengelolaan keuangan POKMAS. Dari angket yang disebarakan kepada peserta kegiatan PKM diperoleh hasil seperti pada Gambar 4.



**Gambar 4.** Pemahaman Terkait Kebijakan Dan Alur Pengelolaan Keu. POKMAS

Gambar tersebut mendeskripsikan bahwa pemahaman terkait kebijakan dan alur pengelolaan keuangan POKMAS yang dimiliki peserta kegiatan sebagian besar pada kategori baik dan sangat baik. Bahkan mereka semangat untuk melanjutkan program terkait kebijakan dan alur pengelolaan keuangan POKMAS.

- e. Evaluasi Produk Berupa Meningkatkan Kinerja Keuangan Sekretariat POKMAS Hasil dari pelatihan ini adalah meningkatkan kinerja keuangan sekretariat POKMAS. Telah dibuatkan draft pembukuan

sekretariat POKMAS baik pembukuan untuk menyusun laporan keuangan maupun pembukuan terkait alokasi dana lingkungan dan sosial.

### 3.2. Pembahasan Hasil Pelaksanaan Kegiatan PKM

Peserta kegiatan PKM telah memahami kebijakan, alur dan prosedur pengelolaan keuangan sehingga berdampak pada memadainya kinerja sekretariat POKMAS. Deskripsi dari masing-masing hasil pelaksanaan kegiatan pelatihan pengelolaan keuangan POKMAS adalah sebagai berikut:

#### 1. Kebijakan Pengelolaan Keuangan POKMAS

##### a. Kebijakan Pembukaan Rekening Bank

Setiap POKMAS wajib memiliki rekening bank dengan mengatasmakan nama organisasi bukan nama pribadi. *Speciment* rekening bank POKMAS harus ditandatangani oleh minimal tiga orang anggota POKMAS aktif, yakni Koordinator, Sekretaris dan salah seorang anggota POKMAS. Setiap penarikan dana dari rekening bank harus ditandatangani oleh tiga nama penandatangan yang didasarkan pada hasil rapat anggota POKMAS dan didukung atau dilampiri Berita Acara (BA) hasil rapat. Apabila POKMAS hendak melakukan transfer dana kepada Kelompok Masyarakat sebagai mitra POKMAS, maka transfer bank hanya dilakukan dengan bukti transaksi yang sudah ditandatangani oleh POKMAS dan disertai Berita Acara persetujuan pemanfaatan dana.

##### b. Kebijakan Pengeluaran Dana

Semua pembayaran dengan Bukti Kas Keluar harus dirangkum per bulan dan dilakukan inspeksi oleh Koordinator POKMAS. Bukti Kas Keluar tersebut harus

ditandatangani oleh pihak yang menerima, pihak yang menyetujui, dan pihak yang mencatat. Semua pengeluaran Bukti Kas Keluar dicatat dalam sistem pembukuan yang berlaku dan dilakukan uji silang dengan daftar pengeluaran (bukti kas keluar), sifat atau jenis pembayarannya harus teridentifikasi secara jelas. Semua lembar copy Bukti Kas Keluar harus disimpan sesuai dengan aturan penyimpanan (diodner danurut tanggal transaksi). Bukti Kas Keluar harus jelas dan rinci penggunaannya, diperlukan bukti/nota toko sebagai lampiran Bukti Kas Keluar jika pengeluaran/pembelanjaan ke Toko. Blanko Bukti Kas Keluar yang masih kosong tidak diperkenankan ditandatangani oleh pihak yang menerima, pihak yang menyetujui, dan pihak yang mencatat.

##### c. Kebijakan Kas

Pengelola kas adalah sekretaris (berdasarkan peran dan fungsi Sekretaris POKMAS dalam struktur organisasi). Semua transaksi kas wajib didukung dengan Bukti Kas Keluar, Bukti Kas Masuk atau Bukti Pindah Bukuan. Sekretaris POKMAS wajib melakukan kas opname secara berkala, minimal 1 bulan sekali.

##### d. Kebijakan Sistem Pembukuan

Sistem pembukuan yang digunakan adalah sistem pembukuan berpasangan (*double entry*) dengan perpaduan antara *cash basis* dan *accrual basis*. Pembukuan berpasangan merupakan cara pencatatan yang lebih memungkinkan untuk mencatat penerimaan dan pengeluaran dengan mencatat di kedua akun tersebut. Sistem ini memudahkan untuk melakukan pengecekan seberapa besar

perbedaannya jika dibandingkan dengan anggarannya masing-masing. Pembukuan dijilid per buku per tahun

e. Kebijakan Penyusunan RAPB POKMAS

Anggaran tahunan POKMAS disusun berdasarkan rencana tahunan POKMAS yang sesuai dengan prioritas kegiatan. Selain itu, POKMAS harus menyusun rencana anggaran biaya operasional. Setiap tahun akuntansi, POKMAS dibantu oleh Sekretaris dan Unit Pengelola baik Unit Pengelola Keuangan, Unit Pengelola Lingkungan, maupun Unit Pengelola Sosial harus menyusun anggaran yang tepat dan realistis dalam menaksir penerimaan dan pengeluaran lembaga dan disampaikan pada Rembug Warga Tahunan.

Sekretariat POKMAS harus menghasilkan laporan pengelolaan keuangan bulanan bagi POKMAS, yang menjelaskan secara rinci perubahan keuangan dalam satu periode bulanan dan laporan tahunan. Pemantauan oleh POKMAS dengan melihat Saldo buku kas periode berjalan harus tepat sesuai dengan jumlah tunai dalam kotak kas kecil. Saldo ini harus dicek dengan melakukan penghitungan uang tunai pada akhir bulan dengan mengisi *Form Kas Opname*. Setiap perbedaan yang terjadi harus dijelaskan, dan selanjutnya dilakukan penyesuaian. Elemen yang sangat penting dalam pelaporan keuangan adalah pengauditan. Selain pemeriksaan eksternal yang harus dilakukan oleh auditor independen setiap tahun, POKMAS hendaknya memiliki sistem pemeriksaan internal yang setidaknya telah dilakukan secara rutin.

#### 4. 4. KESIMPULAN

1. Peserta kegiatan POKMAS telah memahami kebijakan, alur dan prosedur pengelolaan keuangan sehingga berdampak pada memadainya kinerja sekretariat POKMAS. Adapun kebijakan pengelolaan keuangan POKMAS terdiri

dari: Kebijakan Pembukaan Rekening Bank, Kebijakan Pengeluaran Dana, Kebijakan Kas, Kebijakan Sistem Pembukuan, dan Kebijakan Penyusunan RAPB POKMAS. Selanjutnya, alur pembukuan POKMAS dimulai dari pencatatan transaksi pada masing-masing bukti sesuai dengan jenis transaksinya kemudian bukti-bukti tersebut diposting pada masing-masing buku sesuai dengan jenis transaksi yang tercatat dalam bukti tersebut, dan dilaporkan pada Laporan Pemasukan dan Pengeluaran POKMAS, serta Laporan Rencana dan Realisasi.

2. Sekretariat POKMAS harus menghasilkan laporan pengelolaan keuangan bulanan bagi POKMAS, yang menjelaskan secara rinci perubahan keuangan dalam satu periode bulanan dan laporan tahunan.

#### Referensi

- [1] Yusuf, Y. 2009. *Dinamika Kelompok, Kerangka Studi dalam Perspektif Psikologi Sosial*. Bandung: Armico.
- [2] Robbins, S.P. 1996. *Perilaku Organisasi*. Jakarta: Prenhallindo. Edisi bahasa Indonesia. Jilid 1.
- [3] Johnson, D.W., Johnson, J.P. 1997. *Joining Together, Group Theory and Group Skills*. 5th Edition. Boston: Allyn and Bacon.
- [4] Soekanto, S. 2009. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Cetakan ke-29. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- [5] Cragan, J.F., Wright, D.W. 1996. *Theory and Research in Small Group Communication*. 2nd Ed. MN: Burgess
- [6] Cartwright, D., Zander, A. 1968. *Group Dynamic: Research and Theory*. 3rd Ed. New York, Evanston and London: Harver and Row Publishers.
- [7] Aronson, A., Wilson, T. D., Akert, R. M. 2005. *Social Psychology*. 5th Edition. New York: Prentice-Hall, Inc.
- [8] Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan

- [9] Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2009 tentang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan.
- [10] Abdullah, R. (2019). Pelatihan Pengelolaan Keuangan Badan Keswadayaan Masyarakat (Bkm) Di Kelurahan Palabusa Kota Baubau Sulawesi Tenggara. *Prosiding PKM-CSR*, 2.